

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adriaman, M. (2024). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Isnaini, A. A. L., Lubis, A. A., & SH, M. (2022). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Pustaka Prima.
- Kilimanjaro, H. (2024). Kepastian Hukum Kutipan Buku Letter C dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah.
- K. Wiryani, F., SH, M. S., & Febriansyah Ramadhan, S. H. (2025). Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, dan Konflik Struktural. Setara Press Penerbit Buku Hukum PT Cita Intrans Selaras (Citila).
- Maisa, S. H. (2025). Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. CV Eureka Media Aksara.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah di Indonesia.
- Suyanto. (2023). Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah: Kajian Yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sampai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Unigres Press.
- Suyanto. (2023). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan. Unigres Press.
- Suyanto. (2023). Pengantar Hukum Agraria. Deepublish.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.

B. Jurnal / Artikel Hukum

- Al-Mighfar, A., & Nurbaedah, N. (2025). Kedudukan Letter C Desa Dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2 inpress), 290–297.
- Anam, N. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Perolehan Tanah Di Indonesia. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 590–601.
- Ananda, R. S., Widodo, J. S. A., Hapsari, E. L. N., Maulita, A. C., & Fikri, M. A. H. (2025). Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Pertanahan: Kajian Terhadap Mekanisme Pendaftaran Tanah Berdasarkan UUPA dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1997. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 881–890.
- Anshari, N. L., Nisa, K., & Hamonangan, M. D. (2024). Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, dan Susunan Pengadilan Tata Usaha. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(2), 142–147.
- Anwar, S., & Sari, D. (2025). Implikasi Kedudukan Leter C Sebagai Dasar Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA. *Eksaminasi: Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(2), 112–128.
- Baharuddin, M., & Wahyudi, A. (2025). Analisis Kekuatan Pembuktian Dokumen Tanah Lama Dalam Sengketa Agraria. *Jurnal Pertanahan*, 15(1), 178–188.
- Dewandari, D., & Supriyono, S. (2024). Pertanggungjawaban Pihak Terkait (BPN, Kelurahan, dan PERATURAN PEMERINTAHAT) Mengenai Pemberitahuan Terhadap Jual Beli Tanah Letter C Yang Belum Dilakukan Pencoretan di Kelurahan Yang Sudah Menjadi SHM Atas Nama Ahli Waris Pembeli. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1502–1512.
- Dewi, R. T. P., & Ramli, A. (2025). Analisis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Mengalami Tumpang Tindih (Studi Kasus di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang). *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 1595–1632.
- Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 206–218.

- Fahmi, M., & Wahyuni, Y. S. (2025). Kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Dalam Perspektif Siyasah Idariyah dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 105–118.
- Fatmawati, R., & Setiawan, B. (2025). Urgensi Konversi Leter C Menjadi Sertifikat Hak Milik Demi Kepastian Hukum. *Private Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 899–920.
- Gafuraningtyas, D., & Setiatin, N. (2024). Peran Dokumen Administratif Desa Dalam Mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(2), 208–223.
- Hafidz, A., & Kamal, U. (2025). Urgensi Sertifikasi Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak atas Tanah Pasca Peniadaan Alat Bukti Tanah Tertulis Bekas Milik Adat Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2021. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 50–85.
- Hidayat, A., & Pratama, R. (2025). Implementasi Pasal 2, 19, dan 24 UUPA Dalam Penyelesaian Konversi Hak Atas Tanah. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 5(1), 115–139.
- Irawan, E. A., Hermawan, S., & Hartanto, H. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Budaya Hukum Pelaksanaan Penandatanganan Blanko Akta Jual Beli Tanah (Studi di Kabupaten Klaten). *Media Bina Ilmiah*, 19(10), 5975–5986.
- Khoirunisa, L. Q., & Suhattanto, M. A. (2025). Tipologi Masalah Konversi Dokumen Tanah Lama di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 3(1), 20–38.
- Mubarok, A., & Nurlaela, S. (2025). Validitas Dokumen Leter C Sebagai Alat Bukti Pendukung Dalam Pendaftaran Tanah. *Tunas Agraria*, 8(1), 143–158.
- Nasir, S. M. (2024). Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Dokumen Tanah Lama. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1106–1116.
- Putri, B. E., & Setyadji, S. (2024). Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas Hak Pengelolaan (HPL) pada Tanah Hasil Reklamasi dalam Perspektif UUPA. *IBLAM Law Review*, 4(3), 34–47.
- Rineksi, T. W. (2024). Peran Dokumen Historis Dalam Memperkuat Reformasi Agraria di Kabupaten Rejang Lebong. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 17–36.

- Rohmatika, F., Fahad, M., & Sumriyah, S. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 64–76.
- Soputan, M., Wongkar, V. A., & Sumakul, T. F. (2024). Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 291–304.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105–127.
- Syaifullah, A., & Wahyono, E. B. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Konversi Dokumen Tanah: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi: Jurnal Pertanahan dan Tata Ruang*, 5(1), 54–72.
- Tuharea, F., Sari, L., Katjong, R. K., Irsan, I., Tuhumury, H. A., & Mamonto, A. A. N. (2024). Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah. *UNES Law Review*, 6(3), 9135–9147.
- Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 440–455.
- Wijaya, A., Yudhanto, T., Rachma, N., Betari, I., & Bela, L. (2024). Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus: Eksistensi Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 28–36.
- WN, S. F., Rini, R. F., & Fauzan, A. (2025). Kebijakan Pengaturan Agraria di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 3(1), 39–49.
- Wungo, A. X. E., Mauritius, D., & Bire, C. M. D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanda Bukti Hak Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Nomor 41/PDT.BTH/2019/PN Kupang). *Petitem Law Journal*, 2(2), 358–370.

C. Disertasi / Skripsi

- Asari, D. W. (2025). *Kepastian Hukum Petok D terhadap Penerbitan Izin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan 571/PDT.G/2013/PN.SBY)* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Faturohman, F. (2025). *Penggunaan Letter C Desa sebagai Bukti Hak atas Tanah Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah: Studi Kasus di Desa Muktiwari Kabupaten Bekasi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fayadh, R. (2023). *Kedudukan Girik, Letter C, dan Pethuk dalam Sistem Pembuktian Hak atas Tanah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Girik, L. C. *Kedudukan Girik, Letter C dan Pethuk dalam Pembuktian Hak atas Tanah Pasca PERATURAN PEMERINTAH No. 18 Tahun 2021: Kajian Yuridis terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Agraria*.
- Hapsari, A. A. (2025). *Efektivitas Surat Keterangan Waris yang Dikeluarkan oleh Kelurahan dalam Peralihan Hak atas Tanah Karena Warisan di Wilayah Kecamatan Boyolali* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nasution, R. F. (2018). *Kekuatan Pembuktian Rincik untuk Hak Kepemilikan atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 475/Pdt/2016)* [Tesis Magister, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya].
- Nurdiansyah, N. R. (2025). *Analisis Permasalahan Hukum terhadap Pengurusan Pendaftaran Tanah Letter C Menjadi Sertifikat Hak Milik (Studi di Kantor PERATURAN PEMERINTAH Ali Subhan Kabupaten Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Qolbi, T. (2025). *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta di Bawah Tangan serta Dasar Hukum Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2021/PN Smn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1567. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. 27 Oktober 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.